



Dewan Soroti PHR Tak Lagi Disalurkan Lewat Provinsi

Denpasar (Bali Post) -

Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang kini disetorkan langsung oleh Kabupaten Badung kepada enam kabupaten penerima, mendapat sorotan kalangan DPRD Bali. Apalagi, selanjutnya kabupaten pemberi bantuan akan mengawasi kabupaten penerima bantuan itu.

Hal tersebut sekaligus mengesankan bila Pemprov Bali sudah "tidak dianggap" lagi. "Kalau Badung menyerahkan langsung kepada daerah-daerah, nantinya Kabupaten Badung mengawasi daerah-daerah lainnya dalam penggunaan dana PHR. Itu sesuatu yang sangat aneh dan sangat lucu karena satu kabupaten mengawasi kabupaten yang lain," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali Wayan Adnyana di Denpasar, Kamis (16/3) kemarin.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Nyoman Suyasa juga mengaku tidak setuju sejak awal bila Kabupaten Badung menyerahkan langsung bantuan PHR-nya kepada kabupaten penerima. Semestinya, penyerahan bantuan PHR itu tetap melalui provinsi. "Kalau disalurkan langsung sepertinya mau melangkahi provinsi. Itu tidak bagus juga karena Pemprov sebagai koordinator di Bali. Hierarkinya harus begitu. Kalau langsung, Pemprov ini tidak dianggap. Etika pemerintahannya jadinya tidak ada. Itu yang saya sesalkan," jelasnya.

Suyasa menambahkan, kalau memang ada kekurangan dalam penyaluran PHR lewat provinsi, semestinya dilakukan evaluasi. Misalnya, dari segi pertanggungjawaban masih dianggap kurang bagus, tinggal diperbaikinya. "Kami khawatir dengan Badung menyerahkan langsung bantuan PHR-nya akan muncul persepsi dan tuduhan yang lain-lain. Misalnya, politik atau yang lain. Jadi, kurang pas etikanya. Nanti bisa timbul raja-raja kecil. Masyarakat bisa menilai macam-macam," imbuhnya. (kmb32)

Edisi : Jumat, 17 Maret 2017

Hal : 2.



Pemkab Badung Dianggap Tak Beretika

Terkait Pembagian Langsung PHR

DENPASAR - Gubernur Pastika sudah menerima keputusan Pemkab Badung, yang menyerahkan langsung penyalangan dana pajak hotel dan restoran (PHR) kepada enam kabupaten di Bali. Tapi, tidak dengan DPRD Bali. Parlemen Renon menganggap Pemkab Badung tidak beretika dan aneh.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra, Nyoman Suyasa. Menurut Suyasa, sejak awal tidak setuju Pemkab Badung menyerahkan langsung bantuan PHR-nya kepada enam kabupaten penerima. Semestinya penyerahan bantuan PHR itu tetap lewat provinsi. Sebab, secara hierarki pemerintahan Pemprov lebih tinggi daripada pemkab. Pemprov berwenang mengawasi kabupaten. "Kalau disalurkan langsung sepertinya mau melangkahi provinsi. Kalau diserahkan langsung, pemprov ini tidak dianggap. Etika pemerintahannya jadinya tidak ada. Itu yang saya sesalkan," tandas Suyasa ditemui kemarin (16/3).

Suyasa menilai, jika selama ini penyerahan PHR melalui Pemprov dianggap kurang maksimal, seharusnya pengawasan yang diperbaiki. Bukan menyerahkan langsung pada enam kabupaten. Penyerahan langsung PHR dikhawatirkan memunculkan persepsi dan tuduhan berbeda dari masyarakat. Salah satunya dikaitkan dengan politik. "Kurang pas eti-

Kalau disalurkan langsung sepertinya mau melangkahi provinsi. Kalau diserahkan langsung, pemprov ini tidak dianggap. Etika pemerintahannya jadinya tidak ada. Itu yang saya sesalkan,"

Nyoman Suyasa, Ketua Fraksi Partai Gerindra

kanya. Nanti bisa timbul raja-raja kecil. Masyarakat bisa menilai macam-macam," sindirnya.

Kritikan tak kalah pedas juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali, Wayan Adnyana. Ditemui terpisah, Adnyana menyebut tindakan Pemkab Badung sebagai sesuatu yang sangat aneh dan lucu. Dikatakan, bila Badung menyerahkan langsung kepada daerah-daerah, pemkab Badung akan kesulitan mengawasi. Ini karena Badung sebagai kabupaten tidak berwenang mengawasi sesama kabupaten. "Ini sesuatu yang sangat aneh dan sangat lucu. Karena satu kabupaten mengawasi kabupaten yang lain," sentilnya.

Hal senada disampaikan Wakil ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry. Dia menilai sikap Pemkab Badung terkesan dipaksakan. Sugawa menilai penyerahan PHR langsung masih berpotensi debatable. "Saya melihat

penyerahan PHR langsung oleh Badung itu masih bisa diperdebatkan. Harus diingat, bahwa ada perjanjian antara Badung dengan Pemprov dan enam kabupaten penerima," kata politisi asal Buleleng itu.

Semua dewan kompak tidak setuju penyetoran bantuan PHR Badung ke Pemprov Bali dikaitkan dengan hibah anggota DPRD Bali. Menurut Adnyana, kalau sumber pendapatan tidak tercapai, konsekuensinya harus terus berupaya dan mengejar pendapatan itu sendiri. Misalnya dari potensi-potensi sumber pendapatan yang ada, seperti juga DAU atau DAK.

Jika terjadi rasionalisasi anggaran, Adnyana meminta program lain seperti kegiatan SKPD dikaji ulang. "Tidak ada istilah harus hibah yang dikorbankan. Apakah hibah itu dianggap tidak penting. Kebutuhan masyarakat seperti memperbaiki pura itu penting," tandas Adnyana.

Ditegaskan, PHR Badung itu tidak ada hubungannya dengan dana hibah. "Jangan selalu kalau ada penurunan pendapatan yang diutak-atik dana hibah," pungkasnya. (san/dot)

Edisi : Jumat 17 Maret 2017.

Hal : 27



Sambut Pemeriksaan Rinci BPK, Badung Gelar Rapat Koordinasi



KOORDINASI - Rapat Koordinasi dipimpin langsung Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa dan Inspektur Luh Suryaniti di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Kamis (16/3) kemarin.

GUNA menyambut pemeriksaan rinci dari BPK RI Perwakilan Bali terhadap LKPD Kabupaten Badung Tahun 2016, Pemkab Badung menggelar rapat koordinasi

guna memantapkan dalam menerima pemeriksaan rinci BPK nanti. Rapat Koordinasi dipimpin langsung Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Sekda

Badung I Wayan Adi Arnawa dan Inspektur Luh Suryaniti di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Kamis (16/3) kemarin. Rakor dihadiri para kepala perangkat daerah termasuk sekretaris masing-masing perangkat daerah.

Inspektur Badung Luh Suryaniti melaporkan, BPK RI telah melaksanakan pemeriksaan entrim I dan entrim II terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk tahun anggaran 2016. Setelah pemeriksaan entrim II, BPK akan melaksanakan audit rinci. Untuk itu, diharapkan masing-masing kepala perangkat daerah untuk menyetorkan LKPD paling lambat tanggal 24 Maret ini, karena LKPD sudah harus diserahkan ke BPK per tanggal 31 Maret. "Pemeriksaan rinci BPK akan mulai dilaksanakan pada minggu pertama April mendatang," tambahnya.

Audit ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan BPK RI. Sebelum audit rinci, didahului dengan audit pendahuluan atau entrim. "Bila ada rekomendasi BPK pada audit entrim, kita harus tindak lanjut, sehingga di audit rinci tidak menjadi catatan. Melalui rakor ini diharapkan akan lebih memantapkan kita dalam menerima pemeriksaan rinci, sehingga tidak terjadi temuan yang sifatnya material di kemudian hari, yang akan mempengaruhi opini," jelas Suryaniti.

Wabup Badung Ketut Suiasa menekankan bahwa terkait dengan pemeriksaan rinci LKPD ini, kepada seluruh kepala perangkat daerah diminta melengkapi laporan-laporan yang mungkin belum tuntas. Sehingga, tidak terulang temuan yang sama setiap tahunnya. "Kami harap masalah aset maupun laporan keuangan agar menjadi atensi sehingga tidak

menjadi temuan berulang setiap tahun," jelasnya.

Wabup Suiasa kembali menegaskan bahwa konsep hulu, tengah dan hilir harus dipengang, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan maupun *out put*-nya harus baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bila ini dapat dilaksanakan, akan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam penyelesaian suatu pekerjaan.

Sementara itu, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa juga menekankan pentingnya untuk memperhatikan masalah aset. Sekda meminta kepala perangkat daerah agar memberikan perhatian khusus kepada staf yang menangani aset sehingga pencatatan dan pelaporan aset menjadi jelas. "Mari kita perhatikan mulai hal-hal yang kecil agar tidak menjadi masalah di kemudian hari," imbuhnya. (ad1495)

Edisi : Jumat, 17 maret 2017.

Hal : 3.



Tuntaskan Kasus Korupsi Polda dan Kejaksaan Bersinergi

Denpasar (Bali Post) -

Penyidik Krimsus Polda Bali dan Pidsus Kejati Bali saat ini sedang berkolaborasi dan bersinergi dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi. Sejumlah perkara yang ditangani Polda Bali sudah masuk Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP-nya) ke pihak kejaksaan. Selain kasus Tukad Mati yang sudah memeriksa ahli yang ditangani pihak Kejari Denpasar, di Badung ada sejumlah kasus yang sedang dibidik. Di antaranya, kasus pengadaan laptop dan alat kesehatan (alkes) RSUP Mangusada.

Kasitut Pidsus Kejati Bali

Wayan Suardi didampingi Kasipenkum Ashari Kurniawan, Kamis (16/3) kemarin mengatakan, untuk perkara baru belum ada yang masuk kejaksaan. Namun, SPDP untuk alkes yang ditangani Polda Bali sudah masuk. Ada sejumlah tersangka yang sudah ditetapkan, yakni SK dan MY. "Ya, SPDP sudah kami terima. Kami tinggal menunggu dari pihak kepolisian. Kewenangan bukan di kami, tapi masih di kepolisian," ujar Suardi.

Di samping beberapa kasus di Badung, Kejati Bali juga sedang merampungkan berkas kasus dugaan korupsi penyero-

botan tanah Jalan By-pass Prof. Mantra di Gianyar. Dalam perkara ini, mantan hakim sudah dijadikan tersangka. Kasus yang belum terselesaikan lainnya adalah kasus pembangunan gedung pendidikan transportasi angkutan darat dan juga pengadaan kapal ikan. Semua deretan kasus ini masih dalam tahap pendalaman yang dilakukan Pidsus Kejati Bali.

Sebelumnya, dalam kasus alkes sudah ditetapkan tersangka berinisial N. SPDP lainnya menyusul SK dan MY yang diduga dari kontraktor atau rekanan. (kmb37)

Edisi : Jumat, 17 Maret 2017

Hal : 2